



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
**SUB UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **KHASAN JUNAIDI**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **651623**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/76 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 278 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 70.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOBIL, DAIHATSU TARUNA FL 2003 STATION Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 209.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 422.209.000**III. HUTANG** Rp. 86.528.813**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 335.680.187

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.